KEMENTERIAN HUKUM RI **BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**	**NOMOR SOP**	W.23.AHU.AHU.1.OT.01.03- 52 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	28 MEI 2021
	TANGGAL REVISI	29 JULI 2025
	TANGGAL EFEKTIF	29 JULI 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA** **BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR** **ORYZA** **NIP. 197912012005011001**
	NAMA SOP	**Pengurusan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)**

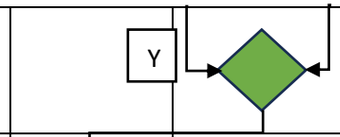
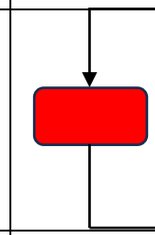
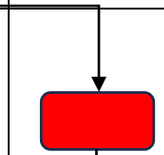
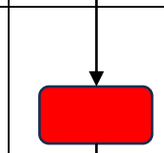
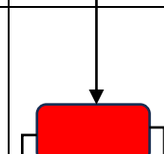
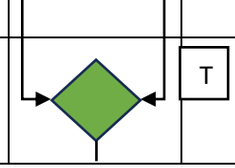
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 463 ayat 1; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Negara Araria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-HT.05.110 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekakyaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Tak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebaaimana ttelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI; 8. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22-PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitian Penaksir dalam Memutuskan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yan Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus;	1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 2. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan 3. Menguasai teknis penulisan dan analisa hukum 4. Menguasai dan mampu berkomunikasi dengan baik 5. Menguasai hukum perdata

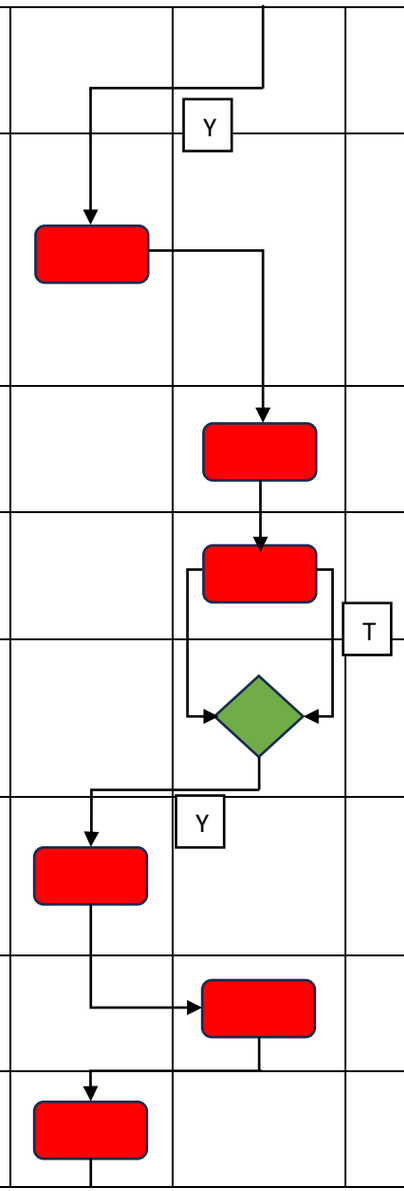
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
SOP Pengumuman Koran SOP Pembuatan Surat ke Kejaksaan Negeri, BPK dan Pengadilan Negeri SOP Pencatatan Boedel SOP Perjanjian Sewa Menyewa SOP Permohonan Ijin Jual Boedel SOP Permohonan Penetapan Pengadilan SOP Penunjukan dan Pengambilan Sumpah Penilai Publik SOP Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Boedel SOP Pengikatan Perjanjian Jual Beli SOP Pembayaran PNBP	Komputer dan kelengkapannya Kamera Digital Alat Ukur Alat Rekam Suara Papan Segel Boedel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila Standar Operasional Prosedur Utama tidak dilaksanakan maka proses dalam Standar Operasional Prosedur Mikro akan terhambat.	Buku Register BHP

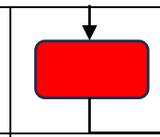
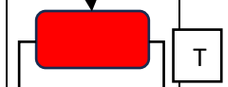
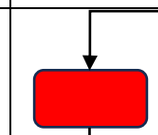
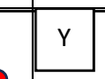
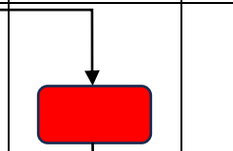
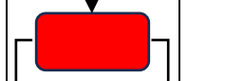
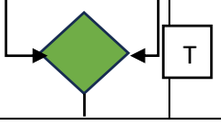
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

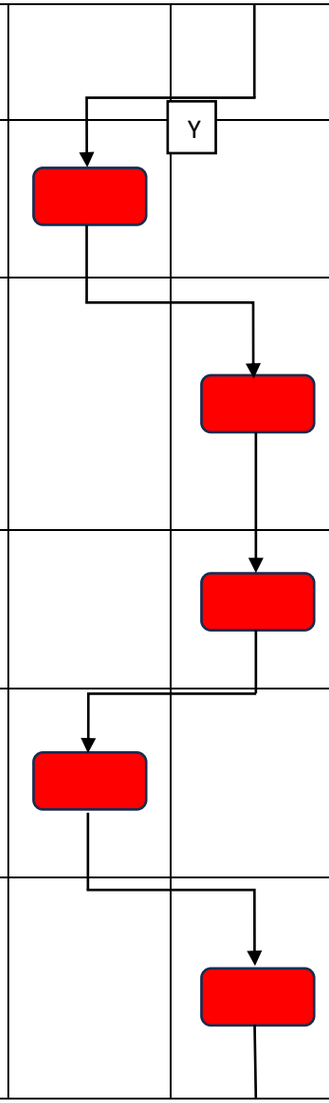
PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)

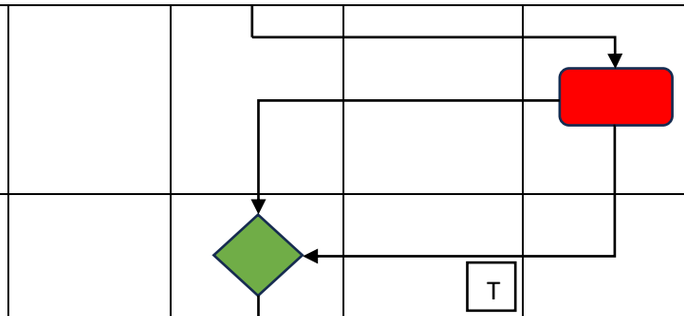
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA BHP	JFKK	KASI HPW	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, memahami, dan mendisposisikan berkas permohonan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir	MULAI				Berkas permohonan, dokumen persyaratan, dan penetapan pengadilan negeri	30 menit	Berkas permohonan, dokumen persyaratan, penetapan pengadilan negeri, dan disposisi Kepala BHP	
2.	Mempelajari, mencatat, menyiapkan, dan meneruskan berkas permohonan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Berkas permohonan, dokumen persyaratan, penetapan pengadilan negeri, dan disposisi Kepala BHP	1 jam	Berkas permohonan, dokumen persyaratan, penetapan pengadilan negeri, dan disposisi Kepala BHP	
3.	Mengetik konsep pengumuman harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir untuk diumumkan pada koran nasional, koran local, dan dimuat dalam berita negara					Berkas permohonan, dokumen persyaratan, penetapan pengadilan negeri, dan disposisi Kepala BHP	4 jam	Berkas permohonan, dokumen persyaratan, penetapan pengadilan negeri, dan disposisi Kepala BHP	
4.	Menyiapkan bahan permohonan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir untuk ditindaklanjuti dan melaksanakan pemanggilan					Dokumen pemanggilan	1 jam	Dokumen pemanggilan	
5.	Memeriksa berkas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dan melakukan pemeriksaan asset di lapangan dan serta membuat berita acara pencatatan					Dokumen Berita Acara pemeriksaan lapangan	2 hari	Dokumen Berita Acara pemeriksaan lapangan	
6	Membuat konsep pengumuman yang berisi tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir yang berkepentingan			T		Konsep dokumen pengumuman	2 hari	Konsep dokumen pengumuman	

7	Meneliti konsep pengumuman yang berisi tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir yang berkepentingan				Konsep dokumen pengumuman	1 hari	Konsep dokumen pengumuman	
8	Menyetujui pengumuman yang berisi tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dan pemangggilan pihak yang berkepentingan untuk diumumkan pada koran nasional dan koran local serta dimuat dalam berita negara				Pengumuman	14 hari	Pengumuman	SOP pengumuman Koran
9	Menyusun bahan pemberitahuan secara tertulis kepada BPK, Kejaksaan Negeri, BPN dan meminta keterangan kepada pengadilan ada tidaknya perlawanan terhadap penetapan/putusan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir				Dokumen surat pemberitahuan	1 hari	Dokumen surat pemberitahuan	
10	Mengkoordinasikan dengan pengadilan ada tidaknya perlawanan terhadap penetapan/putusan tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (tidak klaim) dan membuat perjanjian sewa menyewa antara BHP dengan penghuni yang bersangkutan				Dokumen surat pemberitahuan	1 hari	Dokumen surat pemberitahuan	
11	Menyiapkan bahan pemberitahuan secara tertulis kepada BPK, Kejaksaan Negeri, dan BPN dan meminta keterangan kepada pengadilan ada tidaknya perlawanan terhadap penetapan/putusan tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir				Dokumen surat pemberitahuan	1 hari	Dokumen surat pemberitahuan	
12	Memeriksa dan menyetujui konsep pemberitahuan secara tertulis kepada BPK, Kejaksaan Negeri, BPN dan meminta keterangan kepada pengadilan				Dokumen surat pemberitahuan	1 hari	Dokumen surat pemberitahuan	

	ada tidaknya perlawanan terhadap penetapan/putusan tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir								
13	Menandatanganan surat pemberitahuan kepada BPK, Kejaksaan Negeri, BPN dan meminta keterangan kepada pengadilan ada tidaknya gugatan/perlawanan terhadap penetepan/putusan tentan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Dokumen surat pemberitahuan	2 jam	Dokumen surat pemberitahuan	SOP pembuatan surat ke Kejaksaan Negeri, BPK, dan Pengadilan Negeri
14	Melakukan pemanggilan kepada pemohon dan membuat Berita Acara (BA) pencatatan tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	1 hari	Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	
15	Mengetik surat pemanggilan pemohon dan konsep Berita Acaran (BA) pencatatan harta tentang kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	1 hari	Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	
16	Mengoreksi surat pemanggilan pemohon dan konsep Berita Acaran (BA) pencatatan harta tentang kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan hasil lapangan					Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	2 jam	Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	
17	Menandatangani surat pemanggilan pemohon dan konsep Berita Acaran (BA) pencatatan harta tentang kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan hasil lapangan					Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	1 jam	Berkas pemanggilan dan konsep berita acara	SOP Pencattan harta boedel
18	Membuat konsep perjanjian sewa-menyewa antara BHP dengan pemohon (penghuni) di depan Notaris/PPAT					Berita acara pencatatan	2 hari	Berita acara pencatatan	
19	Menandatanganis perjanjian sewa-menyewa antara BHP dengan pemohon (penghuni) di depan Notaris/PPAT					Perjanjian sewa	1 jam	Perjanjian sewa	SOP Perjanjian sewa menyewa

20	Menerima, memahami, dan memberikan persetujuan atas surat permohonan pembelian harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Surat permohonan pembelian	1 bulan	Surat permohonan pembelian	
21	Membuat konsep permohonan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tembusan disampaikan kepada Direkturr Perdata dan Kepala Kantor Wilayah setempat					Konsep surat permohonan ijin jual	2 jam	Konsep surat permohonan ijin jual	
22	Menerima konsep permohonan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tembusan disampaikan kepada Direkturr Perdata dan Kepala Kantor Wilayah setempat					Konsep surat permohonan ijin jual	2 jam	Konsep surat permohonan ijin jual	
23	Penyampaikan hasil persetujuan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tembusan disampaikan kepada Direkturr Perdata dan Kepala Kantor Wilayah setempat					Dokumen ijin jual dan konsep surat permohonan ijin jual	2 jam	Dokumen ijin jual dan surat permohonan ijin jual	SOP Ijin jual boedel
24	Menyampaikan hasil persetujuan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dari Menteri melalui Dirjen AHU kemudian ditembuskan kepada Direktur Perdata selanjutnya membuat konsep permohonan penetapan ke pengadilan					Dokumen ijin jual dan surat persetujuan ijin jual	1 minggu	Dokumen ijin jual dan surat permohonan ijin jual	
25	Mengetik konsep permohonan penetapan ke pengadilan atas persetujuan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan penetapan pengadilan	2 jam	Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan penetapan pengadilan	
26	Memeriksa konsep permohonan penetapan ke pengadilan atas persetujuan ijin jual berli harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, jika					Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan penetapan pengadilan	2 jam	Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan penetapan pengadilan	

	lengkap ditandatangani untuk ditindak lanjuti. Jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi							
27	Menandatangani permohonan penetapan ke pengadilan atas persetujuan ijin jual berli harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dari Menteri melalui Dirjen AHU					Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan penetapan pengadilan	2 jam	Berkas pengajuan dan surat permohonan penetapan pengadilan	SOP Permohonan penetapan Pengadilan
28	Menerima penetapan pengadilan atas persetujuan ijin jual harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dari BHP dilengkapi usul penunjukkan penilai public berdasarkan harga penawaran appraisal tembusan disampaikan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor Wilayah setempat					Penetapan pengadilan	1 bulan	Penetapan pengadilan	
29	Mengajukan konsep permohonan pengangkatan sumpah appraisal berdasarkan harga penawaran atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Konsep permohonan pengangkatan sumpah penilai publik	2 jam	Konsep permohonan pengangkatan sumpah penilai publik	
30	Menandatangani permohonan pengangkatan sumpah appraisal berdasarkan harga penawaran atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir untuk dipreses di Pengadilan setempat					Konsep permohonan pengangkatan sumpah penilai public	2 jam	Surat permohonan pengangkatan sumpah penilai public	SOP Penunjukan dan pengambilan sumpah appraisal
31	Mengajukan kosnep permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaaan orang yang dinyatakan tidak hadir kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU dan disertai dokumen pendukung tembusan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor Wilayah					Berkas pengajuan	2 jam	Berkas pengajuan	

32	Mengetik konsep permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaaan orang yang dinyatakan tidak hadir, jika lengkap diajukan ke Menteri Hukum dan Ham untuk ditindak lanjuti. Jika tidak, dikembalikan untuk dilengkapi					Berkas pengajuan	2 jam	Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	
33	Memeriksa kelengkapan berkas dan konsep surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir					Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	2 jam	Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	
34	Menandatangani permohonan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaaan orang yang dinyatakan tidak hadir, jika setuju ditandangani, disampaikan kepada Dirjen AHU untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk dilengkapi					Berkas pengajuan dan konsep surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	2 bulan	Berkas pengajuan dan surat permohonan ijin pelaksanaan penjualan	SOP Ijin pelaksanaan penjualan boedel
35	Mengundang Notaris dan menerima konsep akta jual beli harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dengan pemohon					Konsep akta jual beli	2 jam	Konsep akta jual beli	
36	Memeriksa konsep akta jual beli harta kekayaan orang yang dinytakan tidak hadir denan pemohon untuk diproses lebih lanjut					Konsep akta jual beli	2 jam	Konsep akta jual beli	
	Memeriksa pemungutan PNBP harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir: Penjualan harta kekayaan 2.5% Penyelesaian harta kekayaan selaku pelaksanan 7%					Bukti pembayaran	2 jam	Bukti pembayaran	SOP Pembayaran PNBP
38	Menandatangani akta jual beli harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir dengan pemohon dihadapan Notaris kemudian menyerahkan dokumen kepada pemohon					Konsep akta jual beli	2 jam	Akta jual beli	SOP Pengikatan perjanjian jual beli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi